



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP






DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara perlu adanya pengendalian dan penataan arsip secara baik dan benar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan perlu membentuk instrument hukum yang mengatur mengenai klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PLH Sekda	Wakil Bupati

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang RincianUrusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1953);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan tata Kerja Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusutan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PCB Sekda	Wakil Bupati
				

Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo  
Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI  
ARSIP






BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan, dalam penyelenggaraan Kearsipan di Daerah Dinas Kearsipan Dan Peprustakaan sebagai Lembaga Kearsipan Daerah.
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
7. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	<sup>PuH</sup> Sekda	Wakil Bupati
				

- (3) Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas dan fungsi unit kearsipan serta berfungsi sebagai klasifikasi inaskah dinas yang tercipta, dasar pemberkasan, penataan, dan penyusutan arsip.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

#### Pasal 6

Dalam menyusun klasifikasi arsip, setiap Unit kearsipan harus memperhatikan prinsip, meliputi:

- a. logis;
- b. faktual;
- c. perbaikan berkelanjutan;
- d. sistematis;
- e. akomodatif; dan
- f. kronologis.

### BAB V






#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Setiap Unit Kearsipan melaksanakan Klasifikasi Arsip harus menyesuaikan dengan Klasifikasi Arsip sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Pj Sekda	Wakil Bupati
				

- 040 PERPUSTAKAAN / DOKUMEN / KEARSIPAN / SANDI
- 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
- 090 PERJALANAN DINAS

**100 PEMERINTAHAN**





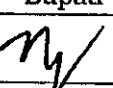
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 120 PEMERINTAHAN PROVINSI
- 130 PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 150 LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
- 160 DPRD PROVINSI
- 170 DPRD KABUPATEN / KOTA
- 180 HUKUM
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

**200 POLITIK**

- 210 KEPARTAIAN
- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU / PILKADA

**300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- 310 PERTAHANAN
- 320 KEMILITERAN / TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 380 PENDAMPINGAN/REHABILITASI/REKONSTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PuH Sekda	Wakil Bupati
				

18. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
20. Skema Klasifikasi Arsip adalah penjabaran kerangka induk klasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman pengelompokan arsip secara logis dan sistematis yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penunjuk terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3





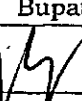
Ruang lingkup pada ketentuan klasifikasi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## BAB IV

### KLASIFIKASI ARSIP

#### Pasal 4

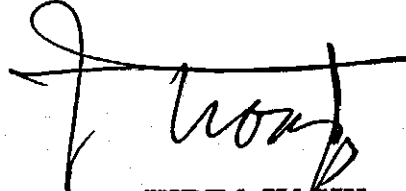
- (1) Klasifikasi arsip digunakan untuk pengelolaan arsip dinamis bagi unit kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode klasifikasi arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

Kepala DKPD/	Kabag. Hukum	Asisten I	P.H. Sekda	Wakil Bupati
				

Ditetapkan di : Kwandang

Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang




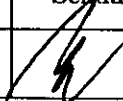
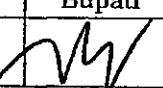
Pada tanggal : 5 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021  
NOMOR ... 472

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Plh Sekda	Wakil Bupati
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : TAHUN 2021

TANGGAL : TAHUN 2021





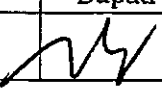
TENTANG : PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

**PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**

A. UMUM

1. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum ke khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 (tiga) perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
2. Kegiatan substantive adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional. Kegiatan substantive ini membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu organisasi.
3. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu instansi.
4. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif.
5. Sedangkan angka 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif.
6. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protocol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya

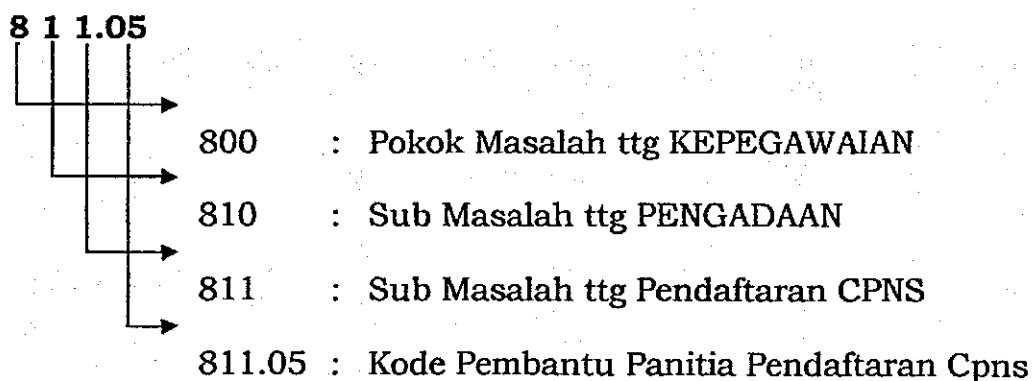
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Plt Sekda	Wakil Bupati
				



7. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud adalah :

- a. 01 Perencanaan;
- b. 02 Penelitian;
- c. 03 Pendidikan;
- d. 04 Laporan;
- e. 05 Panitia;
- f. 06 Seminar, Lokarya, Workshop;
- g. 07 Statistik;
- h. 08 Peraturanperundangan-undangan;
- i. 09 .....

8. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan Klasifikasi sebagai berikut:



9. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitas dan substansi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, adalah

**000 UMUM**

- 010 URUSAN DALAM
- 020 BARANG DAN JASA
- 030 KEKAYAAN DAERAH

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Pu Sekda	Wakil Bupati

**400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 410 PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 450 AGAMA
- 460 SOSIAL
- 470 KEPENDUDUKAN
- 480 MEDIA MASSA
- 490 .....

**500 PEREKONOMIAN**






- 510 PERDAGANGAN
- 520 PERTANIAN
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 PERTAMBANGAN/KESAMUDRAAN
- 550 PERHUBUNGAN
- 560 TENAGA KERJA
- 570 PERMODALAN
- 580 PERBANKAN/MONETER
- 590 AGRARIA

**600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**

- 610 PENGAIRAN
- 620 JALAN
- 630 JEMBATAN
- 640 BANGUNAN
- 650 TATA KOTA
- 660 TATA LINGKUNGAN
- 670 KETENAGAAN
- 680 PERALATAN
- 690 AIR MINUM

**700 PENGAWASAN**

- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 720 BIDANG POLITIK
- 730 BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Plt Sekda	Wakil Bupati
				

- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN
- 790 BIDANG KEUANGAN

**800 KEPEGAWAIAN**






- 810 PENGADAAN
- 820 MUTASI
- 830 KEDUDUKAN
- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
- 850 CUTI
- 860 PENILAIAN
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
- 880 PEMBEHENTIAN
- 890 PENDIDIKAN KEPEGAWAIAN

**900 KEUANGAN**

- 910 ANGGARAN
- 920 OTORISASI
- 930 VERIFIKASI
- 940 PEMBUKUAN
- 950 PERBENDAHARAAN
- 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
- 970 PENDAPATAN
- 980 . . . .
- 990 BENDAHARAWAN

**B. RINCIAN**






<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
000	<b>UMUM</b>
001	<i>Lambang</i>
001.1	<i>Garuda</i>
001.2	<i>Bendera Kebangsaan</i>
001.3	<i>Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)</i>
001.4	<i>Bandir / Umbul-Umbul</i>
002	<i>Tanda Kehormatan / Penghargaan ( Khusus untuk Non PNS )</i>
002.1	<i>Bintang</i>
002.2	<i>Satyalencana</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Plt Sekda	Wakil Bupati
				

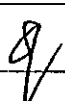
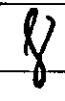

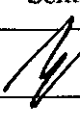
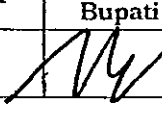
002.3	Satya karya Nugraha
002.4	Penghargaan secara adat
002.5	Penghargaan lainnya
003	Hari Raya / Besar
003.1	Nasional ( 17 Agustus, Hari Pahlawan , Hari Anak, HKSN, dsb )
003.2	Keagamaan
003.3	Hari UlangTahun / HUT ( Hari Jadi Provinsi/ Kabupaten/ Kota )
004	Ucapan
004.1	TerimaKasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapanlainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Jabatan lainnya
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>
011	Gedung Kantor, termasuk instalasi
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas
013	Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma / hotel
014	Rumah SusunApartemen
015	Peminjaman sarana Prasarana Kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)
016	Pengurusan Kendaraan Dinas
017	Keamanan/ Ketertiban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Ket Sekda	Wakil Bupati
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

019.1	Upacara bendera
019.2	Tata tempat
019.2.1	Pemasangan gambar Presiden / Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
<b>020</b>	<b>BARANG DAN JASA</b>
021	Penawaran
021.1	Penawaran Barang
021.2	Penawaran Jasa
022	Barang
022.1	Barang Bergerak
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
022.2	Barang Tidak Bergerak
023	Jasa
024	<b>ALAT TULIS</b>
025	Pakaian Dinas
026	-
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk lelang
027.1	Prakualifikasi :rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan, negoisasi, evaluasi
027.2	SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja( SPMK )
	Bintang
027.4	Serah Terima Pekerjaan
127.4	Serah Terima Pekerjaan
127.5	Pemeriksaan Pekerjaan
127.6	Perpanjangan Waktu / Fercemajore
127.7	Denda
127.8	Sanggahan
127.9	Pemeliharaan Barang / Jasa
028	Inventaris
<b>030</b>	<b>KEKAYAAN DAERAH</b>
031	Barang-Barang tidak bergerak( tanah, perkebunan, pertanian, hutan , tambak )

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PUH Sekda	Wakil Bupati
				




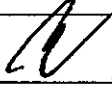
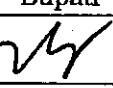
032	Barang-Barang tidak bergerak( gedung, asrama, monumen / bangunan bersejarah dll )
033	Tanaman
034	Alat – alatberat
035	Hewan
036	Barang Persediaan Dalam Gedung
037	Alat Pengangkut( Darat, Laut, Udara)
038	Peralatan Pabrik ,Laboratorium
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
039	Peralatan Kesehatan / Medis( Rumah Sakit, Balai Pengobatan
<b>040</b>	<b>PERPUSTAKAAN / DOKUMEN /KEARSIPAN / SANDI</b>
041	Perpustakaan
041.1	Pameran Bahan Perpustakaan
041.2	Pengolahan( Katalog, Bibliografi
041.3	Sirkulasi / layanan
041.3.1	Keanggotaan
041.321	Peminjaman dan Pengembalian
041.5	Pemeliharaan, Pelestarian / alih media
041.6	PembinaanPerpustakaan
041.61	Bantuanbuku, rak
041.7	Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaan
041.8	Jenis-Jenis Perpustakaan ( Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
041.9	Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
042	Dokumentasi
043	-
044	-
045	Kearsipan
045.1	Pola Klasifikasi
045.2	Akuisisi Arsip
045.3	Penyusutan Arsip
045.31	Jadwal Retensi Arsip
045.32	Penilaian Arsip
045.33	Pemindahan Arsip
045.34	Penyerahan Arsip
045.35	Pemusnahan Arsip

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PUK Sekda	Wakil Bupati
				

045.4	Pembinaan Kearsipan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
045.41	Pengawasan
045.42	Bimbingan Kearsipan
045.5	Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip
045.51	Pumigasi dan Termit Control
045.52	Laminasi
045.53	Alih Media
045.6	Layanan
045.7	Pemasyarakatan
045.71	Pameran
045.72	Penertiban Naskah Sumber Arsip
045.73	Sosialisasi Kearsipan
045.34	Penyerahan Arsip
045.8	Pengembangan Sistem
045.81	Sistem Kearsipan
045.82	Sistem Jaringan Informasi kearsipan
046	Sandi
047	Telegram, Telex, Radio, ISB
048	Data Elektronik
049	
<b>050</b>	<b>PERENCANAAN DAN EVALUASI Meliputi RPJPN ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ), RPJPD ( Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ), Musrembang, Musrembangpus, antar Kementerian, Musrembangnas, Musrembangdes</b>
050.1	RPJMN ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
050.11	RENSTRA ( Rencana Strategi )
050.12	RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
050.13	RENSTRA BAPPEDA
050.2	Program Nasional
050.21	RKP ( Rencana Kerja Pembangunan )
050.22	RKA-KL ( Rencana Kerja Anggaran kementrian. Lembaga)
050.23	RKPD ( Rencana Kerja Pembangunan Daerah
050.24	Rencana Kerja SKPD

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Pj Sekda	Wakil Bupati
				

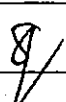
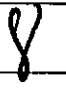


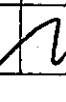
050.25	KUA ( Kebijakan Umum Anggaran ), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran
050.26	Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi
050.27	Nota Keuangan
050.28	RKT (Rencana Kerja Tahunan)
050.29	RKO (Rencana Kerja Operasional)
051	Laporan
051.1	Laporan Berkala
051.2	LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah)
052	Evaluasi
052.1	Evaluasi Rencana Strategis
052.11	Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
052.12	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
052.13	Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota
052.14	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<b>060</b>	<b>ORGANISASI KETATALAKSANAAN</b>
061	Organisasi
061.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
061.2	Tata tertib Kantor, Termasuk Pengaturan Hari dan Jam Kerja Pegawai
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
062	Organisasi Badan Non Pemerintah
063	Organisasi Badan Pemerintah
064	Organisasi Semi Pemerintah
065	Ketatalaksanaan
065.1	Tata Naskah Dinas
065.2	Stempel Dinas dan Stempel Jabatan
065.3	Papan Nama Instansi Pemerintah / Non Pemerintah
065.4	Alamat – alamat Kantor dan Pejabat
065.5	Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
066	Tata Hubungan Kerja
067	Standart Operasional Prosedur
068	Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
069	Analisis Jabatan
069.1	Pengukuran/ Penilaian beban kerja jabatan Struktural dan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PAH Sekda	Wakil Bupati
				








	<i>Fungsional</i>
069.2	<i>Uraian Jabatan</i>
<b>070</b>	<b><i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i></b>
071	<i>Riset meliputi perijinan bagi Peneliti , Riset Design Pembahasan sampai dengan Laporan akhir asset</i>
072	<i>Pengembangan</i>
072.1	<i>Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)</i>
072.2	<i>SINAS (Sistem Inovasi Nasional)</i>
072.3	<i>SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi Cluster, Kab/Kota, Desa Inovatif</i>
072.4	<i>Inkubator Tehnologi dan Bisnis</i>
072.5	<i>Pameran Produk Inovasi/ Riset</i>
072.6	<i>BTC (BisnisTehnologi Center)</i>
072.7	<i>Raptek (Penerapan Iptek)</i>
072.8	<i>HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)</i>
073	<i>Kajian</i>

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
073.1	<i>Kajian Strategis/ diskusi/ Forum Group Discussion</i>
073.2	<i>Seminar</i>
073.3	<i>Workshop</i>
073.4	<i>Rapat Koordinasi/ Rapat Teknis</i>
073.5	<i>Lokakarya</i>
073.6	<i>Diseminasi/ Sosialisasi hasil penelitian</i>
<b>074</b>	<b><i>Kerjasama Penelitian</i></b>
074.1	<i>InstansiPemerintah Pusat/ Daerah</i>
074.2	<i>Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta</i>
074.3	<i>Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
074.4	<i>Lembaga Internasional</i>
075	<i>Perekayasaan</i>
076	<i>Jarlit bang (Jarinagn Penelitian dan Pengembangan)</i>
077	<i>Publikasi Ilmiah</i>
077.1	<i>Jurnal Ilmiah</i>
<b>080</b>	<b><i>KONFERENSI/ RAPAT KOORDINASI</i></b>
081	<i>Gubernur</i>
082	<i>Bupati/ Walikota</i>






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Pu Sekda	Wakil Bupati
				

083	<i>Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)</i>
084	<i>Instansi lainnya (diluar Kemendagri)</i>
085	<i>Internasional di dalam Negeri</i>
086	<i>Internasional di luar Negeri</i>
<b>090</b>	<b>PERJALANAN DINAS</b>
091	<i>Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Daerah</i>
092	<i>Perjalanan Menteri ke Daerah</i>
093	<i>Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)</i>
094	<i>Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas</i>
095	<i>Perjalanan Tamu Asing ke Daerah</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
096	<i>Perjalanan Presiden/ Wakil Presiden ke Luar Negeri</i>
097	<i>Perjalanan Menteri ke Luar Negeri</i>
098	<i>Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri</i>
099	<i>Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri</i>
<b>100</b>	<b>PEMERINTAHAN</b>
<b>110</b>	<b>PEMERINTAHAN PUSAT</b>
111	<i>Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan</i>
111.1	<i>Penanggung Jawaban Presiden Kepada MPR</i>
111.2	<i>Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan</i>
112	<i>Wakil Presiden, Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan</i>
113	<i>Susunan Kabinet</i>
113.1	<i>Reshuffle</i>
113.2	<i>Penunjukan Menteri ad Intern</i>
113.3	<i>Sidang cabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1</i>
114	<i>Kementerian Dalam Negeri</i>
114.1	<i>Amanat Menteri Dalam Negeri</i>
<b>115</b>	<b>Kementrian Lainnya</b>
116	<i>Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)</i>
117	<i>Lembaga Non Kemneterian</i>
118	<i>Otonomi Daerah</i>
119	<i>Kerjasama Antar Kementerian</i>
<b>120</b>	<b>PEMERINTAH PROVINSI</b>






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PuH Sekda	Wakil Bupati
				

120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
<b>120.02</b>	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahan kode wilayah
120.1	Koordinasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kdrjasama antar Provinsi/ Daerah dan Luar Negeri
121	Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, , pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan – badan pertimbangan daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan/ Pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibu Kota Provinsi
125.7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
<b>130</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA</b>
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten/ Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati/ Walikota (LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koordinasi
130.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
<b>130.12</b>	<b>Instansi Vertikal</b>

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
130.13	Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
131	Bupati/ Walikota, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan,

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PLH Sekda	Wakil Bupati
				




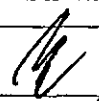
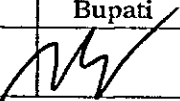
	<i>pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya</i>
132	<i>Wakil Bupati / Walikota, meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya</i>
133	<i>Sekretaris Daerah, meliputi Pencalonan, serah terima jabatan</i>
134	<i>Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah, meliputi Muspida</i>
135	<i>Pembentukan Daerah</i>
135.1	<i>Pembentukan Daerah Otonom</i>
135.2	<i>Pembentukan Wilayah</i>
135.3	<i>Perubahan Batas Wilayah</i>
135.4	<i>Pemekaran Wilayah</i>
135.5	<i>Permasalahan Batas Wilayah</i>
135.6	<i>Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kota</i>
135.7	<i>Pemberian dan Pengganti nama Kota, daerah, Jalan</i>
136	<i>Pembagian wilayah</i>
137	<i>Penyerahan Urusan</i>
138	<i>Pemerintahan Wilayah Kecamatan</i>
138.1	<i>Pembentukan Kecamatan</i>
138.2	<i>Pemekaran Kecamatan</i>
138.3	<i>Perluasan/ Perubahan batas wilayah Kecamatan</i>
138.4	<i>Pemindahan Ibu Kota Kecamatan</i>
138.5	<i>Laporan Kecamatan</i>
<b>140</b>	<b><i>PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN</i></b>
141	<i>Pamong Desa Meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian</i>
142	<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kelurahan (APBDes / Kelurahan)</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
143	<i>Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll</i>
144	<i>Lembaga Tingkat Desa : rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD</i>
145	<i>Administrasi Desa / Kelurahan : Monografi, Peta Rpa Bumi dll</i>
146.1	<i>Pembentukan Desa / Kelurahan</i>
146.2	<i>Pemekaran Desa / Kelurahan</i>
146.3	<i>Perubahan dan Perluasan batas Wilayah Desa / Kelurahan</i>
146.4	<b><i>Perubahannama Desa / Kelurahan</i></b>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Plt Sekda	Wakil Bupati
				

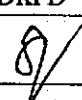


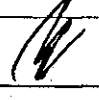
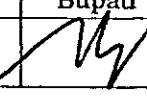
146.5	Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa / Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa / Kelurahan
147	RT - RW
<b>150</b>	<b>LEGISLATIF MPR / DPR / DPD</b>
<b>151</b>	<b>Keanggotaan MPR</b>
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian antarwaktu
<b>152</b>	<b>Keanggotaan DPR</b>
152.1	Pencalonan
152.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
152.3	Pemberhentian
152.31	Recall
152.32	Meninggal
152.4	Pelanggaran
152.5	Pergantian Antar Waktu
<b>153</b>	<b>Keanggotaan DPD</b>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
154	Persidangan
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
156	Hak
157	Jawaban Pemerintah
158	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
<b>160</b>	<b>DPRD PROVINSI</b>
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	PH Sekda	Wakil Bupati
				

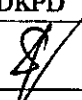
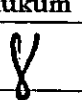

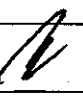
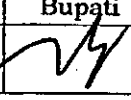
161.2	<i>Pengangkatan dan pengambilan Sumpah</i>
161.3	<i>Pelanggaran</i>
161.4	<i>Pemberhentian Antar Waktu</i>
161.41	<i>Meninggal Dunia</i>
161.42	<i>Mengundurkan Diri</i>
161.43	<i>Diberhentikan</i>
161.5	<i>Alat Kelengkapan Dewan</i>
161.51	<i>Pimpinan</i>
161.52	<i>Badan Musyawarah</i>
161.53	<i>Komisi</i>
161.54	<i>Badan Legislasi Daerah</i>
161.55	<i>Badan Anggaran</i>
161.56	<i>Badan Kehormatan</i>
161.57	<i>Alat Kelengkapan lain (Pansus)</i>
162	<i>Persidangan</i>
162.1	<i>Rapat – rapat</i>
162.11	<i>Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
162.12	<i>Rapat Pimpinan DPRD</i>
162.13	<i>Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
162.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
162.15	<i>Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
162.16	<i>Rapat Fraksi</i>
162.2	<i>Fraksi</i>
162.3	<i>Tata Tertib</i>
162.4	<i>Kode etik</i>
162.5	<i>Reses</i>
162.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
162.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
163	<i>Kesejahteraan</i>
163.1	<i>Keuangan</i>
163.2	<i>Penghargaan</i>
164	<i>Hak</i>
<b>170</b>	<b>DPRD KABUPATEN / KOTA</b>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

171	<i>Keanggotaan</i>
171.1	<i>Pencalonan</i>
171.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
171.3	<i>Pelanggaran</i>
171.4	<i>Pemberhentian Antar Waktu</i>
171.41	<i>Meninggal Dunia</i>
171.42	<i>Mengundurkan Diri</i>
171.43	<i>Diberhentikan</i>
171.5	<i>Alat Kelengkapan Dewan</i>
171.51	<i>Pimpinan</i>
171.52	<i>Badan Musyawarah</i>
171.53	<i>Komisi</i>
171.54	<i>Badan Legislasi Daerah</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
171.55	<i>Badan Anggaran</i>
171.56	<i>Badan kehormatan</i>
171.57	<i>Alat Kelengkapan Lain ( Pansus )</i>
172	<i>Persidangan</i>
172.1	<i>Rapat-Rapat</i>
172.11	<i>Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa</i>
172.12	<i>Rapat Pimpinan DPRD</i>
172.13	<i>Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
172.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
172.15	<i>Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
172.16	<i>Rapat Fraksi</i>
172.2	<i>Fraksi</i>
172.3	<i>Tata Tertib</i>
172.4	<i>Kode Etik</i>
172.5	<i>Reses</i>
172.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
172.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
173	<i>Kesejahteraan</i>
173.1	<i>Keuangan</i>
173.2	<i>Penghargaan</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

174	Hak
<b>180</b>	<b>HUKUM</b>
180.1	Konstitusi
180.11	Dasar Negara
180.12	Undang-Undang Dasar
180.13	Undang-Undang
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres / Perpres / Inpres
180.16	Kepmen / Permen / Inmen
180.17	Perundang-tingkat Provinsi meliputi Perda, Keppub / Pergub / Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Perda, KepBup/KepWal, PerBup/PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>

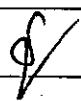


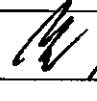
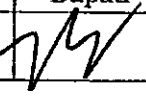
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				







183.122	<i>Pengadilan Tinggi Agama Islam</i>
183.123	<i>Mahkamah Islam Agung</i>
183.13	<i>Peradilan Militer</i>
183.131	<i>Mahkamah Militer Tingkat Pertama</i>
183.132	<i>Mahkamah Militer Tinggi</i>
183.133	<i>Mahkamah Militer Agung</i>
183.14	<i>Peradilan Tata Usaha Negara</i>
183.141	<i>Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama</i>
183.142	<i>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</i>
183.143	<i>Mahkamah Tata Usaha Negara Agung</i>
183.15	<i>Peradilan Tindak Pidana Korupsi</i>
183.16	<i>Peradilan Hak Asasi Manusia</i>
183.17	<i>Mahkamah Konstitusi</i>
183.18	<i>Komisi Yudisial</i>
183.19	<i>Ombustmen</i>
183.2	<i>Upaya Hukum</i>
183.21	<i>Banding</i>
183.22	<i>Kasasi</i>
183.23	<i>Derden Verset</i>
183.24	<i>Peninjauan Kembali</i>
183.25	<i>Grasi, Amnesti, Abolisi</i>
183.3	<i>Eksekusi</i>
183.4	<i>Pembinaan hukum, meliputi kadarkum</i>
183.5	<i>Bantuan Hukum, meliputi LBH</i>
184	<i>Hukum Internasional</i>
185	<i>Imigrasi</i>
185.1	<i>Visa</i>
185.2	<i>Paspor</i>
185.3	<i>Exit</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
185.4	<i>Reentry</i>
185.5	<i>Lintas Batas/Batas Antar Negara</i>
186	<i>Kepenjaraan</i>
186.1	<i>Registrasi narapidana</i>
186.2	<i>Pembinaan narapidana</i>
186.3	<i>Pembebasan narapidana</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

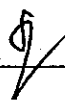
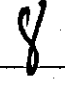


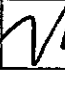
186.4	Tahanan titipan
187	Kejaksaan
187.1	Penuntutan Umum
187.2	Penuntutan Khusus
188	Hukum Adat
<b>190</b>	<b>HUBUNGAN LUAR NEGERI</b>
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan luar negeri
<b>200</b>	<b>POLITIK</b>
201.1	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.2	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201.3	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya
201.4	Keadaan Politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan ipoleksos budhankam
201.6	Orde baru
201.7	Orde Reformasi
<b>210</b>	<b>KEPARTAIAN</b>
211	Partai Politik
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program Kerja, data Kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas / Musda PARPOL
211.5	Sruktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan PARPOL
211.6	Data inventaris dan Keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan Pembubaran partai / organisasiterlarang
212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai / organisasi terlarang
212.3	Ijin Meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
212.4	Daftar berkala mengenai Keadaan anggota partai/ organisasi terlarang

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang
<b>220</b>	<b>ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
221	Pembentukan organisasi
221.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
221.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
221.3	Program Kerja Organisasi
221.4	Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
222	Pembinaan organisasi
222.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
222.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</b>
231	Pembentukan organisasi
231.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
231.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
231.3	Program kerja organisasi
231.4	Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
232	Pembinaan Organisasi
232.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
232.2	Daftar inventaris kekayaan organisasi
<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>
241	Pembentukan organisasi
241.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
241.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
241.3	Program kerja organisasi
241.4	Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
242	Pembinaan Organisasi
242.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
242.2	Daftar Inventaris kekayaan organisasi
<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN</b>
251	Pembentukan organisasi
251.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
251.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
251.3	Program kerja organisasi
251.4	Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				




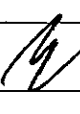

252	<i>Pembinaan Organisasi</i>
252.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
252.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>
261	<i>Pembentukan organisasi</i>
261.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
261.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
261.3	<i>Program kerja organisasi</i>
261.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
262	<i>Pembinaan Organisasi</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
262.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
262.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
<b>270</b>	<b>PEMILU ( PEMILIHAN UMUM ), PILKADA ( PEMILIHAN KEPALA DAERAH)</b>
271	<i>Pencalonan</i>
272	<i>Nomor Urut / Tanda Gambar</i>
273	<i>Kampanye</i>
273.1	<i>Dana kampanye</i>
274	<i>Petugas Pemilu</i>
275	<i>Pemilih / Daftar Pemilih</i>
276	<i>Sarana</i>
276.1	<i>TPS</i>
276.2	<i>Kendaraan</i>
276.3	<i>Surat Suara</i>
276.4	<i>Kotak Suara</i>
277	<i>Pemungutan Suara / Penghitungan Suara</i>
278	<i>Hasil Pemilu</i>
278.1	<i>Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislative</i>
278.2	<i>Penetapan pemenang pilkada</i>
279	<i>KPU / KPUD</i>
<b>280</b>	<b>PENGAWASAN PEMILU /PILKADA</b>
281	<i>Pemantauan</i>
282	<i>Pelanggaran</i>
283	<i>Sengketa</i>
284	<i>Panwaslu</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
300.1	<i>Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan</i>
300.2	<i>Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan</i>
300.3	<i>Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan/ketertiban umum</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
300.4	<i>Program kerjasama tata cara penanggulangan keamanan</i>
301	<i>Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)</i>
302	<i>Pengawasan Trantibum</i>
303	<i>Penegakan pelaksanaan perda</i>
231.3	<i>Program kerja organisasi</i>
231.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
232	<i>Pembinaan Organisasi</i>
232.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
232.2	<i>Daftar inventaris kekayaan organisasi</i>
<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>
241	<i>Pembentukan organisasi</i>
241.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
241.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
241.3	<i>Program kerja organisasi</i>
241.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
242	<i>Pembinaan Organisasi</i>
242.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
242.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN</b>
251	<i>Pembentukan organisasi</i>
251.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
251.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
251.3	<i>Program kerja organisasi</i>
251.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
252	<i>Pembinaan Organisasi</i>
252.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
252.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>
261	<i>Pembentukan organisasi</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Wakil Sekda	Wakil Bupati
				




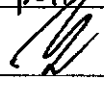
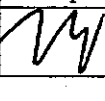
261.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
261.2	Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
261.3	Program kerja organisasi
261.4	Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota
262	Pembinaan Organisasi
262.1	Kegiatan organisasi dan pelaporannya
262.2	Daftar Inventaris kekayaan organisasi
271	Pencalonan
272	Nomor Urut / Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih / Daftar Pemilih
276	Sarana
276.1	TPS
276.2	Kendaraan
276.3	Surat Suara
276.4	Kotak Suara
277	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara
278	Hasil Pemilu
278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislative
278.2	Penetapan pemenang pilkada
279	KPU / KPUD
<b>280</b>	<b>PENGAWASAN PEMILU / PILKADA</b>
281	Pemantauan
282	Pelanggaran
283	Sengketa
284	Panwaslu
<b>300</b>	<b>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>
300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan / ketertiban umum
300.4	Program kerjasama tata cara penanggulangan keamanan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	pp Sekda	Wakil Bupati
				

301	Koordinasi dan kerjasamakeamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
302	Pengawasan Trantibum
303	Penegakkanpelaksanaanperda
304	Pembinaan / PenyuluhanPelanggaranPerda
305	Patroli wilayah
306	LaporanKunjunganVIP, VVIP, tamuasing
306.1	Pengamanan
306.2	Pengawalan
307	Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
<b>310</b>	<b>PERTAHANAN</b>
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	KetahananBangsa
315	KetahananEkonomi
316	Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
<b>320</b>	<b>KEMELITERAN /TNI</b>
321	Latihan Militer
322	Wajib militer
323	Operasimiliter
324	Kekaryaannya TNI
325	Kemanunggalan TNI denganrakyat
<b>330</b>	<b>KEAMANAN</b>
331	Kepolisian
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
331.1	PolisiPamongPraja
332	Huru hara / Demonstrasi
333	SenjataApi / Tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat - suratkaleng
337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan / Larangan
<b>340</b>	<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)</b>

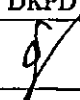
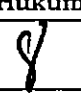

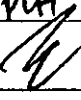
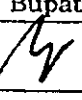
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asistan I	<i>PH</i> Sekda	Wakil Bupati
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas
341.2	Pendidikan / Latihan Linmas
341.3	Latihan PAM swarkasa
341.4	Pendidikan / latihan MENWA
342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan Uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swarkasa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
<b>350</b>	<b>KEJAHATAN</b>
351	Makar/Pemeberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiyaan/Pencurian/Perampasan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
354	Subversi/Penyeludupan/Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	<b>Penanganan Korban</b>
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya (Traficking, hipnotis, dll)
360	<b>BENCANA</b>
360.1	Pelatihan
360.2	Surat Keputusan
360.3	Berita Acara
361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				



364	<i>Kebakaran</i>
364.1	<i>PemadamKebakaran</i>
365	<i>Kekeringan</i>
366	<i>Posko Bencana</i>
367	<i>Koordinasi/unsurpengarahPenanggulangan Bencana</i>
368	<i>MOU Pemerintah Pusat BNPB</i>
<b>370</b>	<b>KECELAKAAN</b>
371	<i>Latihan SAR</i>
372	<i>Latihan KeterampilanPenyelamatan di air dan menyelam</i>
373	<i>Latihan ManagemenbagiPejabat</i>
374	<i>Satkorlat dan Satlak PBP</i>
375	<i>PelatihanKemampuanpusdalopbagiaparap PBP</i>
376	<i>Latihan keterampilanpemadamkebakaran</i>
377	<i>Kecelakaandarat, laut, udara</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
378	<i>Investigasi / PenyelidikanKecelakaan</i>
379	<i>AsuransiKecelakaan</i>
<b>380</b>	<b>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</b>
381	<i>Perencanaan</i>
381.1	<i>Perencanaan Teknis</i>
381.2	<i>Rekomendasi</i>
382	<i>Bantuanbaca</i>
383	<i>Penanggulangan Bencana denganpihak lain</i>
384	<i>Sarana prasararehabilitasi dan rekonstruksi</i>
<b>385</b>	<b>PUSDALOPS</b>
386	<i>Kunjunganlapangan</i>
387	<i>Relawan</i>
388	<i>Laporanbencana</i>
<b>390</b>	<b>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</b>
391	<i>InstansiPemerintah Pusat</i>
392	<i>InstansiPemerintah di Daerah</i>
393	<i>Lembaga International</i>
394	<i>Lembaga Non Pemerintah Nasional</i>
<b>400</b>	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
401	<i>Kebijakan dan program pemerintahuntukkesejahteraanrakyat</i>
<b>410</b>	<b>BANGUNAN DESA / KELURAHAN</b>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				


411	Gotong Royong
411.1	Swadaya Gorong Royong
411.11	Pembinaan
411.12	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa (LSD)
411.3	Latihan Kerja Masyarakat
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
411.6	Kelembagaan Desa
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Pembiayaan Pembangunan Desa
412.21	Inventarisasi Desa
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan / Stimulasi
412.25	Perkreditan Desa
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
412.32	Koperasi Unit Desa (KUD)
413	Sarana dan Prasarana Desa
413.1	Pemukiman Kembali penduduk
413.2	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa
413.3	Perbaikan kampung
413.4	Teknologi Tepat Guna (TTG)
414	Pengembangan Desa
414.1	Perlombaan Desa dan Kelurahan
414.11	Pedoman
414.12	Penilaian

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

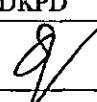

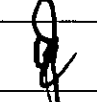
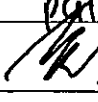
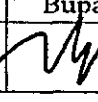
414.13	Kejuaraan
415	Koordinasi
415.1	Kerjasama
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
415.11	Luar Negeri
415.12	Perguruan Tinggi
415.13	Kementerian/Lembaga Pemerintah
415.14	Lembaga lainnya
<b>420</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
420.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan
420.2	Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
420.3	Pendidikan Kemasyarakatan
421	Sekolah (termasuk akreditasi)
421.1	Prasekolah (PAUD, Playgroup)
421.2	Sekolah Dasar
421.3	Sekolah Menengah
421.4	Sekolah Kejuruan
421.5	Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
421.6	Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
421.7	Kegiatan Pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar
421.8	Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422	Administrasi Sekolah
422.1	Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
422.2	Tahun Pelajaran
422.3	Hari Libur
422.4	Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
422.5	Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
422.6	Ijazah, Sertifikat
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
422.7	Bantuan Pendidikan :Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
423	Metode Belajar

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				


423.1	Kuliah
423.2	Ceramah, Simposium, Seminar
423.3	Diskusi
423.4	Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL
423.5	Kurikulum
423.6	Karya Tulis, Karya Ilmiah
423.7	Ujian
424	Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)
424.1	Pertukaran Guru ke Luar Negeri
424.2	Sertifikasi Guru
425	Sarana Pendidikan
425.1	Bangunan Pendidikan
425.11	Gedung Sekolah
425.12	Kampus
425.13	Pusat Kegiatan
425.14	Perpustakaan
425.15	Laboratorium
425.2	Buku
425.3	Perlengkapan Pendidikan
425.4	Sistem Informasi Pendidikan
425.5	Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
426	<b>KEOLAHRAGAAN</b>
426.1	Pembinaan Keolahragaan
426.11	Olah raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
426.12	Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
426.13	Olah raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olahraga tradisional)
426.14	Iptek dan Industri Olah raga
426.15	Sarana Prasarana Keolahragaan
426.2	Kemitraan Olah Raga
427	<b>KEPEMUDAAN</b>
427.1	Pertukaran Pemuda
427.2	Paskibraka
427.3	Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				





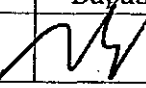
	:gelanggang remaja
427.4	Kemitraan Pemuda
427.5	Karang Taruna
428	Kepramukaan/Kepanduan
430	<b>KEBUDAYAAN</b>
430.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan
430.2	Pembinaan bidang kebudayaan
431	Kesenian
431.1	Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)
431.2	Sarana
431.21	Gedung Kesenian
431.22	Padepokan
431.23	Lembaga Adat
431.24	Kegiatan adat/tradisi
431.3	Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan : Festival , pentas seni
432	Kepurbakalaan
432.1	Museum
432.2	Peninggalan Kuno
432.21	Candi, termasuk pemugaran
432.22	Benda
433	Sejarah
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
434	Bahasa
435	Penghayat Kepercayaan
<b>440</b>	<b>KESEHATAN</b>
440.1	Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan
441	Pembinaan Kesehatan
441.1	Gigi
441.2	Mata
441.3	Jiwa
441.4	Kanker
441.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
441.6	Perawatan
441.7	Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				





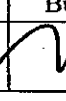
441.8	<i>Kesehatan Ibu dan Anak</i>
441.9	<i>JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)</i>
441.91	<i>JAMKESMAS</i>
441.92	<i>JAMKESDA</i>
441.93	<i>JAMPERSAL</i>
441.94	<i>Jaminan lainnya</i>
442	<i>Obat-obatan</i>
442.1	<i>Pengadaan</i>
442.2	<i>Pemeriksaan Obat</i>
442.3	<i>Penyimpanan Obat</i>
442.4	<i>Distribusi obat</i>
442.5	<i>Pengawasan Obat</i>
442.51	<i>Obat Generik</i>
442.52	<i>Obat Terlarang</i>
442.53	<i>Pemalsuan Obat</i>
443	<i>Pemberantasan dan pencegahan penyakit</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
443.1	<i>Pencegahan Penyakit</i>
443.2	<i>Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P.2.M.L)</i>
443.21	<i>Kusta</i>
443.22	<i>Kelamin, HIV, HIDS, IMS</i>
443.23	<i>Frambusia</i>
443.24	<i>T.B.C</i>
443.25	<i>Kelera</i>
443.26	<i>SARS, dan jenis penyakit lainnya</i>
443.3	<i>Pemberantasan penyakit menular sumber binatang (P2B)</i>
443.31	<i>Malaria</i>
443.32	<i>Dengue Heemorrhagie Fever (DHF)</i>
443.33	<i>Filaria</i>
443.34	<i>Serangga</i>
443.35	<i>Rabies</i>
443.36	<i>Atrak</i>
443.37	<i>Leptosirosis</i>
443.38	<i>Chikungunya</i>
443.39	<i>Penyakit lainnya</i>
443.4	<i>Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama MastcmikAkut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan PencegahanPenyakitCA.Serviks
443.47	Pemberantasan dan PencegahanPenyakitCA.Mammae
443.48	Pemberantasan dan PencegahanPenyakitCA.Hepar
443.49	Pemberantasan dan PencegahanPenyakitCA.Paru, Dan Penyakit Lainnya
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
443.5	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaranudara
443.55	JambanKeluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higienesanitasi
443.61	Tempat-tempatpembuatan dan penjualanmakananminuman (TPPMM), lasaboga
443.62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jambankeluarga, Sanitasirumahtangga
443.66	Kesehatan institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443.67	Higienesanitasi CA. Mammae
443.68	Higienesanitasi CA. Hepar
443.69	Higienesanitasi CA. Paru
443.7	Kejadiankhusus
443.71	Dekopensatiokordosis (Seranganjantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443.74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda PLH	Wakil Bupati
				

444	<i>Gizi dan Pengawasan Makanan</i>
444.1	<i>Kekurangan Makanan</i>
444.2	<i>Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi busuk</i>
444.3	<i>Keracunan Makanan</i>
444.4	<i>Menu makanan rakyat</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
444.5	<i>Gondok endemic (GAKI)</i>
445	<i>RSU, RSJ, RS Khusus</i>
445.1	<i>Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitandengankondisipasien, visum)</i>
445.11	<i>Rawat Inap</i>
445.12	<i>Rawat Jalan</i>
445.13	<i>IGD</i>
445.14	<i>IBS</i>
445.15	<i>ICU</i>
445.16	<i>MCU (Medical Check Up)</i>
445.2	<i>Penunjang Medis</i>
445.21	<i>Farmasi</i>
445.22	<i>Rekam Medik</i>
445.23	<i>Radiologi</i>
445.24	<i>Gizi</i>
445.25	<i>Laboratorium Klinik</i>
445.26	<i>Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik</i>
445.27	<i>Bank Daerah Rumah Sakit</i>
445.28	<i>Sanitasi Rumah Sakit</i>
445.29	<i>CSSD / Laundry</i>
445.3	<i>Keperawatan</i>
445.4	<i>Komite Medik</i>
445.5	<i>SPI (Satuan Pengawas Internal)</i>
445.6	<i>Mutu Rumah Sakit</i>
445.61	<i>Akreditasi</i>
445.62	<i>ISO</i>
445.63	<i>PSBH (Problem Solving For Better Hospital)</i>
445.64	<i>IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</i>
445.7	<i>IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)</i>
445.8	<i>Promosi Layanan Kesehatan</i>






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				




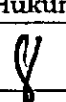


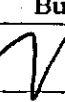
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
445.9	<i>Kasus Hukum Rumah Sakit</i>
446	<i>Tenaga Medis</i>
446.1	<i>Perencanaan Tenaga Medis</i>
446.2	<i>Pendayagunaan Tenaga Medis</i>
446.21	<i>Perijinan Untuk Tenaga Medis</i>
446.22	<i>Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis</i>
446.23	<i>TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)</i>
446.3	<i>Diklat Tenaga Kesehatan / Medis</i>
446.4	<i>Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis</i>
446.5	<i>Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan Spesialis</i>
447	<i>Peralatan Kesehatan</i>
447.1	<i>Standarisasi</i>
447.2	<i>Penyimpanan</i>
447.3	<i>Distribusi</i>
447.4	<i>Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan</i>
448	<i>Pengobatan Alternatif</i>
448.1	<i>Pijat</i>
448.2	<i>Akupunktur</i>
448.3	<i>Jamu dan Herbal</i>
448.4	<i>Dukun</i>
449	<i>Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan</i>
449.1	<i>PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling</i>
449.2	<i>Poliklinik dan Balai Kesehatan</i>
449.3	<i>Rumah Bersalin</i>
449.4	<i>Posyandu</i>
449.5	<i>Laboratorium Kesehatan</i>
449.6	<i>Apotik</i>
449.7	<i>Sanatorium Kesehatan</i>
<b>450</b>	<b>AGAMA</b>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
450.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan</i>
450.2	<i>Bantuan di bidang Keagamaan</i>
451	<i>Islam</i>
451.1	<i>Peribadatan</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.2	Pendidikan Tinggi Agama
451.3	Menengah, MTs, MA
451.4	Dasar, PraSekolah, MI
451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Sarana Pendidikan meliputi Buku, Gedung Sekolah dll
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5	Wakaf
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Khatolik
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatolik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan Hindu
454.2	Rumah Ibadah Pura dll

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda PLH	Wakil Bupati
				






454.3	Tokoh Agama, RohaniawanHindu
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	PeribadatanBudha
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, RohaniawanBudha
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Kong Hu Cu
456.1	Peribadatan
456.2	Rumah Ibadah Klentengdll
456.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
456.4	Mazhab Agama Kong Hu Cu
456.5	Organisasi Agama Kong Hu Cu
<b>460</b>	<b>SOSIAL</b>
461	Rehabilitasipenyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda
461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anakjalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna Susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraananak dan keluarga
463.1	Kesejahteraananak
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu Teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

464	<i>Keperintisan dan Kepahlawanan</i>
464.1	<i>Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya</i>
464.2	<i>Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan</i>
464.3	<i>Cacat Veteran</i>
465	<i>Kesejahteraan Sosial</i>
465.1	<i>Lanjut Usia</i>
465.2	<i>Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi</i>
465.3	<i>Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll</i>
466	<i>Sumbangansocial</i>
466.1	<i>Korban bencana</i>
466.11	<i>Jaminansocial</i>
466.2	<i>Pencairan dana untuk sumbangan :Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dsb</i>
466.3	<i>Panti Asuhan</i>
467	<i>Bimbingansocial</i>
467.1	<i>Masyarakat suku terasing meliputi :bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
468	<i>PMI</i>
469	<i>Makam</i>
469.1	<i>Umum</i>
469.2	<i>Pahlawan</i>
469.3	<i>Khusus, Keluarga, Raja</i>
469.4	<i>Krematorium</i>
<b>470</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>
470.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan</i>
471	<i>Pendaftaran Penduduk</i>
471.1	<i>Identitas Penduduk</i>
471.11	<i>Biodata</i>
471.12	<i>Nomor Induk Kependudukan</i>
471.13	<i>Kartu Tanda Penduduk</i>
471.14	<i>Kartu Keluarga</i>
471.15	<i>Advokasi Identitas Penduduk</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda PLH	Wakil Bupati
				

471.2	PerpindahanPendudukdalam wilayah Indonesia
471.21	PerpindahanPenduduk WNI
471.22	PerpindahanPenduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23	PerpindahanPendudukWNA dan WNI tinggalsementara
471.24	Daerah terbelakang
471.25	Bedol Desa
471.3	PerpindahanPenduduk Antar Negara
471.31	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
471.32	Orang asingtinggalsementara
471.33	Orang asingtinggaltetap
471.34	Perpindahan penduduk antar Negara diwilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.41	Akibat bencana alam
471.42	Akibat kerusuhan social
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
471.43	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.44	Pendaftaran penduduk rentan
472	PencatatanSipil
472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
472.11	Kelahiran
472.12	Kematian
472.13	Advokasi
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.21	Perkawinan Agama Islam
472.22	Perkawinan Agama non Islam
472.23	Perceraian Agama Islam
472.24	Perceraian Agama non Islam
472.25	AdvokasiPerkawinan
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan ana kserta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.31	Pengangkatan anak
472.32	Pengakuan anak
472.33	Pengesahan anak
472.34	Perubahan akta
472.35	Pembatalan akta

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda PKH	Wakil Bupati
				

472.36	Advokasi akta kelahiran
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.41	Akibatperkawinan
472.42	Akibatkelahiran
472.43	Non Perkawinan/ Non kelahiran
472.44	Naturalisasi
472.45	Perubahan WNI ke WNA
473	InformasiKependudukan
473.1	TeknologiInformasi
473.2	Pengolahan Data Kependudukan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
473.21	PendaftaranPenduduk
473.22	Kejadian vital penduduk
473.23	Penduduk non registrasi
473.3	Pelayananinformasikependudukan
474	Perkembanganpenduduk
474.1	PengarahanKuantitasPenduduk
474.11	Strukturjumlah
474.12	Komposisi
474.13	Fertilitas
474.14	Kesehatan reproduksi
474.15	MorbiditasPenduduk
474.16	MortalitasPenduduk
474.2	PengembanganKuantitasPenduduk
474.21	Anak dan remaja
474.22	Pendudukusiaproduktif
474.23	Penduduklanjutusia
474.24	Gender
474.3	PenataanPersebaranPenduduk
474.31	Migrasiantar wilayah
474.32	Urbanisasi
474.4	Perlindungan dan PemberdayaanPenduduk
474.5	PengembanganWawasanKependudukan
<b>475</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>
475.1	Penyiapaninformasidaerahtransmigrasi
475.11	Informasipotensipeluangbekerja dan berusahadidaerahtransmigrasi

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

475.12	Perbandinganpotensidaerahasal dan daerahtransmigrasi
475.13	Permasyarakatan/ sosialisasi transmigrasi
475.14	Peran sertalembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
475.15	Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
475.16	Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
475.17	Kerjasama dibidang transmigrasi
475.18	Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik
475.2	Pemukimantransmigrasi
475.21	Penggunaantanahpemukimantransmigrasi
475.22	Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
475.23	Tata ruangsatuankawasanpengembangan, study kelayakan dan dampaklingkungantransmigrasi
475.24	Teknis ruangsatuanpemukiman dan lokasi/peta informasipemukiman
475.25	Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigrasi, fasilitas umum/ sosial dan jaringan transportasi
475.26	Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatanbatas areal tanah
475.27	Penyelesaian masalahtanah di lokasipemukiman transmigrasi
475.28	Tata ruang pemukiman transmigrasi
475.281	Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
475.282	Rancangankapling TSM
475.283	Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, laha nusaha dan fasilitasumum
475.284	Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan seng ketatanah
475.285	Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
475.286	Pengukuranbatas unit pemukiman
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
475.287	Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
475.289	Sarana pemukimantransmigrasi
475.291	Pembinaan dan pengadilan, penyiapan bangunan rumah transmigran

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

	dan jamban keluarga dan fasilitas umum
475.292	Pembinaan dan pengendalian penyediaan sarana air bersih
475.293	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
475.294	Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
475.295	Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
475.3	Pengerahan, pemindahan dan penempatan
475.31	Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
475.32	Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
475.33	Pengerahan
475.331	Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
475.332	Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
475.333	Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
475.34	Pemberangkatan transmigran
475.341	Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat
475.342	Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
475.343	Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
475.344	Pengawasan perjalanan transmigran
475.345	Pengaturan rute pemberangkatan
475.346	Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
475.35	Penempatan transmigran
475.351	Kesiapan lokasi dan daya tampung
475.352	Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
475.353	Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
475.354	Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
475.4	Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran
475.41	Pelatihan transmigran
475.411	Program pengajaran dan metode pelatihan
475.412	Penyusunan silabus dan modul pelatihan
475.413	Penyusunan calon peserta/pelatih
475.42	Penampungan transmigran di transito
475.421	Pelayanan kesehatan bagi transmigran
475.422	Pelayanan makanan bagi transmigran
475.423	Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
475.5	Pembinaan masyarakat transmigrasi






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				








475.51	Identifikasi dan penjajagan pembinaan
475.511	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
475.512	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
475.513	Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
475.52	Pembinaan Pendidikan
475.521	Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
475.522	Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
475.53	Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
475.54	Pembinaan kesehatan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
475.541	Penyediaan sarana kesehatan dan KB
475.542	Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
475.543	Pendistribusian bantuan pangan
475.55	Pembinaan rohani
475.551	Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama
475.552	Bimbingan adaptasi masyarakat
475.553	Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
475.56	Pelayanan pos di daerah transmigrasi
475.57	Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan
475.58	Penilaian transmigran teladan
475.59	Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
<b>476</b>	<b>KELUARGA BERENCANA</b>
476.1	Alat Kontrasepsi
476.2	Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
476.3	Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
476.4	Pos KB desa
476.5	Akseptor KB
<b>480</b>	<b>MEDIA MASSA</b>
480.1	Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa
	Media
481	cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bilater jadi pelanggaran
481.1	Surat Kabar
481.2	Majalah

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Plt Sekda	Wakil Bupati





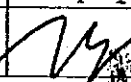
481.3	Buletin
481.4	Jurnal
481.5	Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
481.51	Perindustrian Perdagangan termasuk 9 hargapokok
481.52	Perekonomian dan Perbankan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
481.53	Bidanglainnya
481.6	Layananinformasi/ Leaflet
481.7	Masukan Analisis Gubernur
482	Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
482.1	Radio
482.2	Televisi
482.3	Film Dokumenter
482.4	Pengawasan Lembaga Penyiaran
482.5	Kelompok Pemantau Isi Siaran
482.6	Pengkajian Isi Siaran
482.7	SDM Penyiaran
483	Periklanan
483.1	Ketentuan Pemasangan Reklame
483.2	Pameran
484	Kewartawanan/ Jurnalistik
484.1	Pembentukan Organisasi Profesi
484.2	Kasus-kasus kewartawanan
484.3	Penyalahgunaan Profesi
484.4	Bantuan kepada/ dari organisasi Profesi Wartawan
484.5	Musyawarah Wartawan Indonesia
484.6	Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
484.7	Temu Pers/ Konferensi Pers
484.8	Pers tour
484.9	Kunjungan Wartawan Asing
485	Penyuluhan Masyarakat
485.1	Publikasi
485.2	Pendirian information center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Fotografi

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
486.2	<i>Training Berita Jurnalistik</i>
486.3	<i>BimtekInfokom</i>
486.4	<i>RakordaInfokom</i>
486.5	<i>RakorPengendalianKegiatan</i>
486.6	<i>Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara</i>
487	<i>Hubungan Antar Lembaga</i>
487.1	<i>Non Pemerintah</i>
487.11	<i>Wahana Komunikasi Masyarakat</i>
487.12	<i>Lembaga Komunikasi Masyarakat</i>
487.2	<i>Lembaga Pemerintah</i>
487.21	<i>PertemuanBakohumas dan Kehumasan</i>
487.22	<i>Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)</i>
487.3	<i>Luar negeri</i>
487.31	<i>PromosiLuar negeri</i>
487.32	<i>KunjunganWartawanasing</i>
488	<i>FasilitasiPeningkatanPelayananInformasi</i>
489	<i>SistemNaskahSosialisasiKegiatanGubernur</i>
489.1	<i>Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif</i>
489.2	<i>Dialog Interaktif</i>
489.3	<i>Rubrik</i>
489.4	<i>Materi/pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif</i>
489.5	<i>Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan</i>
<b>500</b>	<b>PEREKONOMIAN</b>
500.1	<i>Dewan stabilitasi</i>
501	<i>Pengadaan Pangan</i>
502	<i>PengadaanSandang</i>
503	<i>Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>510</b>	<b>PERDAGANGAN</b>
510.1	<i>Promosi perdagangan</i>
510.11	<i>Pekan raya</i>
510.12	<i>Iklan</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				





510.13	Pameran
510.14	Event-event
510.15	Lomba-lomba (lombadesain, busana, kerajinan)
510.2	Pelelangan, distribusi
510.21	PemasaranSembako
510.22	Pemasaranhasilindustry
510.23	Penentuanhargapokok
510.3	Bina usaha dan saranaPerdagangan
510.31	Renana dan program Kerja
510.32	PelaksanaanPelayananadministrasi
510.33	Pelaksanaan Teknis
510.34	Pemantauan
510.35	Evalusi dan Pelaporan
510.4	Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
510.41	Pernerbitan SIUP
510.42	Perpanjangan
510.43	Jinprinsip
510.44	Rekomendasi
510.5	Perdaganganantarpulau
510.51	Kerjasama bahanbaku
510.52	Industripemasaran
510.53	Kontrak
510.6	T e r a
510.61	Tera dan Tera ulang
510.62	Takaran
510.63	Timbangan dan anakTimbangan
510.64	Kalibrasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
510.65	Cap tanda tera
510.66	Biaya tera
510.7	BantuanPeralatan
510.71	Proposal
510.72	Surat Perjanjian / Kontrak
510.73	Serah Terima
510.8	Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik
510.9	Kemetrologian

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

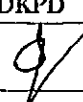
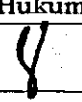
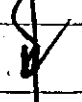

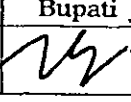
510.91	Standart Tingkat Tiga
510.92	Standart Kerja Satuan Ukuran
510.93	Ukuran Metrologi
510.931	Peralatan
510.932	Laboratorium Metrologi Legal
510.933	Tanki Ukur Mobil
510.934	Meter Taxi
510.935	KWH Meter termasuk didalamnyalistrik dan PDAM
510.936	Pemasaran
511.1	Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll
511.2	Pasar
511.3	Pertokoan, kaki lima, kios
511.4	Pusat perbelanjaan
512	Ekspor
512.1	Ekspor Hasil Industri
512.2	Ijin Ekspor
512.3	512.4
512.5	512.51
512.52	Pemasaran
512.6	Pemberitahuan Ekspor Barang
512.7	Pengawasan Mutu Barang
512.8	Ekspor terddaftar
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
512.9	Evaluasi dan pelaporan
513	Impor
513.1	Ijin Impor
513.11	Pemberian ijin
513.12	Pengendalian ijin
513.2	Standart Mata Dagang Import
513.3	Management Perdagangan Internasional
513.4	Kegiatan Import
513.41	Pembinaan Import
513.42	Pengendalian Import
513.43	Pemantauan Import
513.5	Pengawasan mutu Barang Import

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






513.7	Penyaluran Kegiatan Import
513.71	Bahan Konsumsi
513.72	Bahan Baku
513.73	Bahan Penolong
513.8	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor
514	Perdagangan Antar Pulau
514.1	Kerjasama Bahan baku
514.2	Industri Pemasaran
514.3	Kontrak
515	Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri
515.1	Promosi dan Informasi
515.2	Pameran
515.3	Kerjasama
516	Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
516.1	Peti kemas
516.2	Tangki Penyimpanan
517	Aneka Usaha Perdagangan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>518</b>	<b>KOPERASI</b>
518.1	Bina Usaha Koperasi
518.11	Koperasi Pertanian
518.12	Koperasi Non Pertanian
518.13	Permodalan Koperasi
518.131	Pemupukan Modal
518.132	Pemanfaatan Modal
518.133	Perbankan dan Asuransi
518.134	Permodalan Luar Koperasi
518.135	Kredit Program Umum
518.136	Kredit Program Khusus
518.14	Distribusi dan Jasa Koperasi
518.141	Distribusi Bahan Pokok
518.142	Distribusi Aneka Bahan
518.143	Distribusi Kerjasama Niaga
518.144	Jasa Angkutan
518.145	Jasa Perumahan
518.146	Aneka Jasa

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

518.15	<i>KoperasiKelistrikan, Industri dan Telekomunikasi</i>
518.2	<i>Bina Lembaga Koperasi</i>
518.21	<i>RganisasiKoperasi</i>
518.211	<i>Anggaran Dasar dan AktePendirianKoperasi</i>
518.212	<i>Pemberian Badan Hukum Koperasi</i>
518.213	<i>Penyelesaian Pembubaran Koperasi</i>
518.214	<i>KeragaanKoperasi</i>
518.215	<i>PengakuanKoperasiSekolah</i>
518.216	<i>Amalgamasi</i>
518.217	<i>TertibOrganisasiKoperasi</i>
518.218	<i>PenyelesaianPenyelisihan/ Persengketaan</i>
518.22	<i>Bina Hubungan Alat KelengkapanOrganisasiKoperasi</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
518.221	<i>RapatAnggotaTahunanKoperasi</i>
518.222	<i>Pengurus dan Badan Pemeriksa</i>
518.223	<i>Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)</i>
518.224	<i>Badan Penasehat dan PertimbanganKoperasi Unit Desa (BPP KUD)</i>
518.23	<i>Bina Tata Laksana Koperasi</i>
518.231	<i>KlasifikasiKoperasiPedesaan</i>
518.232	<i>KlasifikasiKoperasiPerkotaan</i>
518.233	<i>KlasifikasiKoperasiSekunder</i>
518.24	<i>AdministrasiKetatalaksanaanKoperasi</i>
518.241	<i>AdministrasiKoperasiPedesaan</i>
518.242	<i>AdministrasiKoperasiPerkotaan</i>
518.243	<i>Karyawan/ ManegerKoperasi</i>
518.244	<i>Sumber Daya Manusia</i>
518.245	<i>Tenaga KerjaSukarelaTerdidik(TKST)</i>
518.246	<i>Penyaluran Alat Sekolah</i>
518.247	<i>BantuanPemdaKepadaKoperasi/ KUD</i>
518.25	<i>Akuntansi</i>
518.251	<i>AkuntansiKoperasiPedesaan</i>
518.252	<i>AkuntansiKoperasiPerkotaan</i>
518.253	<i>AkuatansiKoperasiSekunder</i>
518.26	<i>Pengawasan Koperasi</i>
518.261	<i>Pengawasan Koperasi Primer</i>
518.262	<i>Pengawasan KoperasiSekunder</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Du Sekda	Wakil Bupati
				

518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntansi
518.27	Penyuluhan Koperasi
581.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasioanl
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
<b>520</b>	<b>PERTANIAN</b>
521	Tanaman Pangan
521.1	Rencana dan Program
521.11	Bimas/ Inmas Termasuk Kredit
521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
521.2	Produksi
521.21	Padi
521.22	Palawija
521.23	Hortikultura (Sayuran, Buah-Buahan, Tanaman Hias)
521.24	Panen Gagal (Puso)
521.3	Sarana Usaha Pertanian
521.31	Peralatan
521.32	Meliputi Traktor dan Sebagainya
521.33	Pembenihan dan Pembibitan
521.34	Pupuk
521.35	Irigasi Pertanian

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Wakil Sekda	Wakil Bupati
				







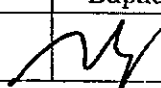
521.36	Rehabilitasi Lahan Pertanian
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
521.4	Perlindungan Tanaman
521.41	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
521.411	Tanaman Pangan
521.412	Hama Tanaman Pangan
521.42	Pemberantas
521.421	Pestisida
521.422	Agensia Pengendahan Hayati
521.43	Tanah Pertanian Pangan
521.431	Persawahan
521.432	Perladangan
521.433	Kebun
521.5	Pengusaha, Petani
521.6	Lahan Kritis
521.7	Pemasaran dan Promosi Pertanian
521.8	Pengembangan Sumber Daya Pertanian
<b>522</b>	<b>KEHUTANAN</b>
522.1	Perencanaan Hutan
522.11	Survey
522.111	Survey PPA
522.112	Survey Areal
522.113	Survey Pembinaan Hutan
522.114	Survey Potensi Hutan
522.12	Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan
522.121	Data Areal Tata Guna Hutan
522.122	Data Areal Konservasi
522.2	Tata Guna Hutan
522.21	Tata Ruang Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				


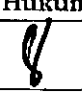
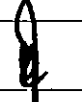
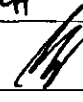
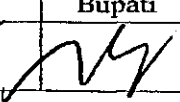
522.223	PembukaanHutan
522.23	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	PengusahaanHutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	SK HPH
522.312	Kerja Sama
522.313	Pembatalan/ Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	InventarisasiIndustri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga KerjaPengusahaanHutan
522.325	Pemegang Saham
522.32.6	Neraca Perusahaan
522.33	RencanaKerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Industri Non- Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non-HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
522.38	Pembangunan HutanTanamanIndustri
522.381	HutanTanamanIndustri Pulp
522.382	HTI Pertukaran
522.39	luran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.47	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.51	Konservasi Jenis
522.511	Satwa yang Dilindungi
522.512	Satwa yang Tidak Dilindungi
522.513	Lembaga Konservasi Satwa
522.514	Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman hutan Raya / Kebun Raya
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan
522.532	Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pecinta Alam
522.542	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

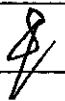
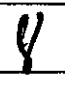

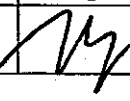
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS
522.553	GangguanKeamananHutan
522.554	Bencana Alam
522.555	KebakaranHutan
522.556	SengketaHutan
522.557	522.557
522.558	Pestisida dan PupukTanamanHutan
522.559	Alat dan MesinKehutanan
522.6	Reboisasi dan RehabilitasiHutan
522.61	Pembenihan
522.611	TegakanBenih
522.612	PengadaanBenih
522.613	Pengujian dan PenyimpananBenih
522.614	Lalu Lintas AngkutanBenih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengada dan PengedarBibitBersertifikat
522.617	Pengada dan PengedarBibit Tidak Bersertifikat
522.62	TanamanReboisasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi Lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi Tanah dan Air
522.625	PengendalianPerladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	PerhutananSosial
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
522.633	Perlebahan
522.7	HutanProduksi
522.71	HutanProduksiTerbatas
522.72	HutanProduksi yang DapatDikonservasi
522.8	Kawasan Lindung
<b>523</b>	<b>PERIKANAN DAN KELAUTAN</b>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

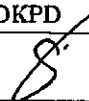
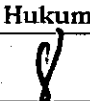

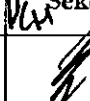
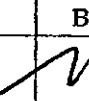
523.1	Rencana, Program, Stastistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
523.23	Sertifikasi Kesehatan ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pelatihan Nelayan
523.32	Pembinaan Wanita Nelayan
523.33	Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI, SKP
523.34	Perbenihan
523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
523.41	Ekspor Hasil Perikanan
523.42	Impor Hasil Perikanan
523.43	Pemasaran Dalam Negeri
523.44	Pengusahaperikanan
523.5	Sarana perikanan
523.51	Pelabuhan Perikanan Pantai
523.52	TPI/PPI
523.53	Kesyahbandaran
523.54	Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb
523.6	Pengendalian hama dan penyakit
523.61	Penyakit ikan
523.62	Hama ikan
523.63	Obat-obatan termasuk sertifikasinya
523.7	Konservasi dan Suaka Laut
523.71	Transplantasi bibit karang
523.72	Terumbu karang
523.73	Mangrove
523.74	Garam
523.75	Harta karun di dalam laut
523.76	Pembinaan/Pendidikan masyarakat pesisir
<b>524</b>	<b>PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

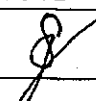
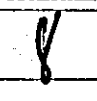

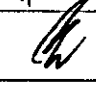
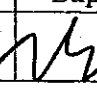
524.1	Produksi
524.11	Perbibitan
524.12	Penyebaran dan PengembanganPeternakan
524.13	Budidaya
524.2	Usaha Peternakan
524.21	Pelayanan Usaha
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
524.22	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
524.23	Pengembangan SDM dan KelembagaanPeternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.31	Pengamatan dan PenyidikanPenyakit Hewan
524.32	Pencegahan dan PemberantasanPenyakit Hewan
524.33	Obat-obatan Hewan
524.34	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.4	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
524.41	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
524.42	Hygieni dan Sanitasi
524.43	ProdukHewani
524.5	Laboratorium Kesehatan Hewan
524.51	Pengujian Mutu Asal Hewan
524.52	Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
524.6	InseminasiBuatan
524.61	ProduksiDistribusi dan Pemasaran
524.62	PemeliharaanTernak dan PelayananReproduk
524.7	Pembibitan dan Budi Daya Ternak
524.71	Ternak Non Ruminansia
524.72	TernakRuminansia
<b>525</b>	<b>PERKEBUNAN</b>
525.1	Program dan Pelaporan
525.11	Pelaporan
525.12	Monitoring
525.13	Statistik Perkebunan
525.2	Produksi
525.21	Karet
525.22	T e h
525.23	Tembakau

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
525.24	Tebu
525.25	Cengkeh
525.26	Kelapa/Kopra/Kelapa sawit
525.27	Kopi
525.28	Kakao
525.29	Jenis Tanaman yang lain
525.3	Usaha Perkebunan
525.31	Benih
525.32	Pembibitan
525.33	Kelompoktani
525.34	Kemitraan
525.35	Rekomendasiijinusahaperkebunan
525.36	Pemasaran Hasil Perkebunan
525.4	PerlindunganTanaman
525.41	Hama
525.42	Pestisida
525.43	AgensiPengendalian Hayati
525.5	Alat dan Mesin Perkebunan
525.51	Power Sprayer
525.52	Hand Sprayer
525.53	Polibag
525.54	Alat Laboratorium Perkebunan
525.55	Reagen
525.56	Sarana/Alat Produksi Perkebunan
525.6	Pengolahanlahan
525.61	Terasering
525.7	Pemasyarakatan
525.71	Penyuluhan
525.72	Sosialisasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
525.73	Informasi
<b>526</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>
526.1	Program BimbinganMassal
526.2	Pengembangan Sarana Sumber Daya
526.21	PembinaanTeknologi

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

526.22	Sarana Produksi dan Permodalan
526.23	Kelembagaan
526.	Aghibisnis
526.3	Mutu Hasil
526.31	Pengelola Hasil Pangan
526.32	Pemasaran Hasil
526.33	Kementriaan
526.4	Distribusi Pangan
526.41	Sistem dan polaDistribusi
526.42	Sarana dan PrasaranaDistribusi
526.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.53	SistemInformasi Pangan
<b>527</b>	<b>PENYULUHAN</b>
527.1	Sumber Daya Manusia
527.11	Penyuluh
527.12	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.13	Stake holder
527.2	Kelembagaan
527.21	Struktural
527.22	Non Struktural
527.23	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.24	Lembaga Profesi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
527.3	PenyelenggaraanPenyuluhan
527.31	Program/ Metode
527.32	Promosi/ Pameran/ Kampanye
527.33	Penghargaan/ Lomba
527.34	Materi
<b>530</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>
530.1	Undang-undangGangguan
531	Industri Logam
532	IndustriMesin/ Elektronik
533	Industri Kimia/ Farmasi






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				



534	IndustriTekstil
535	IndustriMakanan/minuman
536	Aneka Industri/Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah
<b>540</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
541	Minyak dan Gas Bumi
541.1	Pengusahaan
541.11	Perijinan
541.12	Rekomendasi
541.13	KontrakKarya
541.14	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
542.1	EnergiAlternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	EnergiBaruTerbarukan
542.15	Perijinan
542.16	Rekomendasi
542.17	Pembinaan dan Pengawasan
542.2	KonservasiEnergi
542.3	PemetaanEnergi
542.4	RencanaUmumPerencanaanEnergi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, mineral dan batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP Batuan






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Pu Sekda	Wakil Bupati
				

543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP OperasiProduksi
543.33	IUP OperasiProduksiKhusus
543.34	Ijin Usaha Jasa Pertambangan
543.35	PencabutanIjin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.52	PenerbitanKegiatanPertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.61	Reklamasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
543.62	Penutupan
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	Imbuhan CAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	SumurArtesis
544.4	Sumur Bor
544.5	SumurGali (Pasak)
544.6	PengusahaPengebor (APATINDO)
544.7	SumurPantau
544.8	Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

545.3	Vulkanologi
545.31	Pengawasan Vulkanologi
545.32	Panas Bumi
545.4	Hidrogeologi
545.5	Gerakan Tanah (Longsor, amblesan)
545.6	Pengawasan, pengendalian
546	Hidrologi
547	Kesamudraan
548	Penghematan Energi
<b>550</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>
551	Perhubungan Darat
551.1	Lalu lintas jalan raya, sungai, danau

KODE	KLASIFIKASI
551.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
551.12	Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
551.13	Kecelakaan Lalu Lintas
551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan Timbang/ Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan, Rambu-rambu
551.32	Lalu Lintas
551.33	Atur dan Kolam Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana/Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan, Rambu-rambu
551.42	Lalu Lintas

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

551.43	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44	Trayek
551.45	Sarana/Kapal
551.46	Pelabuhan
551.47	Terminal
551.48	Kecelakaan
551.49	Perizinan
551.5	Perkereta-Apian
551.51	Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
551.52	Prasarana (Jalan/Jembatan)
551.53	Trayek
551.54	Angkutan Penumpang
551.55	Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/Perbaikan
551.59	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran Charter/Wisata Turis
552.15	Pelayaran Khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
552.2	Perkapalan-Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton/Tongkang
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer
552.3	Pelabuhan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				


552.31	Tanah/Lokasi
552.32	Dermaga
552.34	Terminal Penumpang
552.35	Terminal Kontainer
552.36	Bangunan/Gedung/Gudang
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
552.37	PerlengkapanTambat Labuh
552.38	LapanganPenumpukan
552.39	Pelabuhan Khusus/DermagaKhusus
552.4	Pengerukan/Perawatan
552.41	Alur Pelayaran
552.42	Kolam Pelabuhan
552.43	Reklamasi Pantai
552.44	Dumping Area
552.45	Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
552.5	Penjagaan Pantai
552.51	Patroli Bandar
552.52	PatroliPerairan
552.53	Penjagaan Pantai &Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
552.6	Angkutan Barang
552.61	P O S
552.62	Minyak
552.63	L o g
552.64	Ternak
552.65	Sembilan Bahan Pokok
552.66	Peti Kemas / EMKL
552.67	Muatan Umum
552.68	Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
552.69	BongkarMuatan
552.7	Keselamatan
552.71	Rambu-rambu/Mercusuar
552.72	Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
552.73	FasilitasKeselamatan/Keamanan
552.74	Telekomunikasi Pelayaran
552.75	SertifikasiKesempurnaan Kapal

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

552.76	Sertifikasi Awak Kapal
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
552.8	Kecelakaan, Gangguan
552.81	Kecelakaan Penumpang/ Kapal
552.82	Kecelakaan Barang
552.83	Gangguan Sarana/ Prasarana
552.84	Pembajakan/ Penyeludupan
552.85	Pencemaran
552.9	Perijinan
552.91	Ijin Berlayar
552.92	Ijin Pekerjaan Bawah Air
552.93	Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal
552.94	Ijin Pembukaan Kantor Cabang
552.95	Ijin Usaha Angkutan Laut
552.96	Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut
552.97	Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
552.98	Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus
552.99	Ijin Pembangunan Dermaga Khusus
553	Perhubungan Udara
553.1	Lalu Lintas Angkutan Udara
553.11	Penerbangan Domestik
553.12	Penerbangan Luar Negeri
553.13	Penerbangan Haji/ Penerbangan Haji
553.14	Penerbangan Charter/ Non Reguler
553.15	Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara
553.2	Pelabuhan Udara
553.21	Tanah/ Lokasi
553.22	Landasan
553.23	Apron
553.24	Terminal Penumpang
553.25	Terminal Cargo
553.26	Bangunan/ Gedung
553.27	Perlengkapan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
553.28	Parkir Kendaraan
553.3	Alat Angkutan

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

553.31	Pesawat Udara
553.32	Helikopter
553.4	Angkutan Barang
553.41	P o s
553.42	Muatan Dalam Negeri
553.43	Muatan Luar Negeri
553.44	EMPU
553.5	SertifikasiKelaikan
553.51	KelaikanPesawat Udara
553.52	KelaikanPeralatanPenunjang
553.53	KelaikanPersonil/Awak Kapal
553.6	Keselamatan
553.61	Rambu-rambu
553.62	Perakitan/Kalibrasi
553.63	FasilitasKeselamatan
553.64	Telekomunikasi Penerbangan
553.7	Kecelakaan/Gangguan
553.71	KecelakaanPenumpang
553.72	Kecelakaan Barang
553.73	Gangguan Sarana/Prasarana
553.74	Pembajakan
553.75	Pencemaran
553.8	Umum
553.81	Asuransi
553.82	Asosiasi
553.83	SATPAM
553.84	Rally Udara/Lomba
553.9	Perizinan
553.91	Izin Terbang/ Flight Approval
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
553.92	Usaha KegiatanPenunjangPenerbangan / EMPU
553.93	Pembukaan Kantor Cabang
553.94	RekomendasiKetinggianBangunan
553.95	Pembangunan Bandar Udara Khusus
<b>554</b>	<b>POS</b>
554.1	Pembinaan

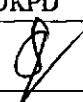



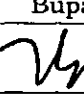
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

554.11	Kebutuhanfasilitas
554.12	Rehabilitasi/Perawatan
554.13	Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan
554.14	StandarisasiPerangkat
554.15	Tanah/Bangunan
554.16	Filateli
554.17	Asosiasi
554.18	Laporan dan Evaluasi
554.2	Pelayanan
554.21	Jasa pos
554.22	Jasa titipan
554.23	Jasa giro
554.24	Benda pos/perangko
554.25	Sampulperingatan
554.26	Jasa pos Elektronik
554.3	Perijinan
554.31	Rekomondasiusaha Jasa pos/Titipan
554.32	Pembukaan Agen/Cabang
554.4	Gangguan Sarana dan Prasarana
554.41	Kecelakaan
554.42	Sabotase
554.43	Penyeludupan
<b>555</b>	<b>TeknologiInformasi</b>
555.1	Kebijakan
555.2	Peralatan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
555.2	Peralatan
555.21	Telepon
555.22	Internet/USO
555.23	Telegram, Telex/SBB,Faximile
555.24	Satelit,Stasiun Bumi
555.25	Radio Kumunikasi
555.3	Sistem
555.4	Pembinaan / Penertiban
555.5	Perijinan
<b>556</b>	<b>Pariwisata dan Rekreasi</b>

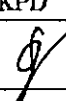
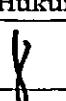


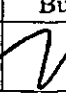
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				








556.1	Usaha Pariwisata
556.11	Usaha Jasa Pariwisata
556.111	Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
556.112	Restoran dan Rumah Makan
556.12	Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
556.13	Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.14	Usaha Sarana Pariwisata
556.141	Ijin Pariwisata
556.142	Ijin Usaha Pariwisata
556.143	Ijin Usaha Jasa Pariwisata
556.144	Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata
556.145	Ijin Usaha Sarana
556.15	Wisatawan
556.151	Wisatawan Nusantara
556.152	Wisatawan Mancanegara
556.16	Promosi dan Informasi Pariwisata
556.161	Dalam Negeri
556.162	Luar Negeri
556.2	Perhotelan
556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
556.3	Travel Service
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata ( Visa, Bea Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi / Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






556.46	Institusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga kepariwisataan
<b>557</b>	<b>Metereologi</b>
557.1	Curah Hujan
557.2	HujanBuatan
557.3	Peneropongan Bintang
<b>560</b>	<b>TENAGA KERJA</b>
560.1	Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah
560.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker Ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	BerkasPersyaratan Calon TKI /TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	PermohonanRekomendasi Passport
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
560.52	PerjanjianKerja TKI/TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	PermohonanFiskalKe Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI/TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatanke Luar Negeri
560.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
560.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan PenelitianPengupahan Daerah/Nasional
561.2	PemohonanPenangguhanPelaksanaanPembayaran Upah

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

	<i>Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi</i>
561.3	<i>Kebutuhan Fisik Minuman</i>
561.4	<i>Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)</i>
561.5	<i>Laporan Data Remittance</i>
561.6	<i>Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW</i>
562	<i>Penempatan</i>
562.1	<i>Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)</i>
562.11	<i>Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)</i>
562.12	<i>Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional</i>
562.13	<i>Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
562.2	<i>Kesepakatan Kerja Bersama</i>
562.3	<i>Lembaga Penyalur Naker</i>
562.31	<i>Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/Daerah Dan Antar Kerja Negara (AKAN)</i>
562.32	<i>Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)</i>
562.33	<i>Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)</i>
563	<i>Latihan Kerja</i>
563.1	<i>Pendidikan Pekerja</i>
563.11	<i>Pendidikan dan Latihan Kerja</i>
563.12	<i>Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)</i>
563.13	<i>Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)</i>
563.2	<i>Sarana dan Prasarana Latihan Kerja</i>
563.21	<i>Tempat Pelatihan (BLK)</i>
563.22	<i>Instruktur/Pelatihan</i>
563.23	<i>Modul/Silabus dan Bahan Praktek</i>
563.24	<i>Kurikulum dan Metode Pengajaran</i>
563.25	<i>Sertifikat</i>
563.3	<i>Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja</i>
564	<i>Tenaga Sukarela</i>
564.1	<i>Butsi</i>
564.	<i>Padat Karya</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				






565	Perselisihan Pekerja
565.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
565.11	Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER
565.12	Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
565.13	Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER
565.14	Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
565.15	Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
565.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
565.17	Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/P4P)
565.18	Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/P4P)
565.2	Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566	Keselamatan Kerja
566.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
566.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
566.3	Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
566.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
566.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
566.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
566.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
566.8	Perlengkapan Sarana Kerja
566.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawatangkat/angkut)
566.82	Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)
566.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
566.84	Pemasangan dan Pemakaian tangkit akbertekanan
566.85	Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
566.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (shifhtmalam)
567	Pemutusan Hubungan Kerja
567.1	Pengaduan PHK sepihak
567.2	PHK missal

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asiaten I	Sekda	Wakil Bupati
				

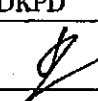


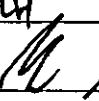
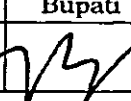
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
567.3	Bantuan hukum bagi pekerja yang di PHK
567.4	Ijin melakukan PHK
67.5	Perhitungan masa kerja bagi pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian uang pesangon bagi pekerja yang di PHK
568	Kesejahteraan Pekerja
568.1	antuanKredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan IjinKerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Tenaga Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
<b>570</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>
570.1	Penanaman Modal Dalam Negeri
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
570.2	Penanaman Modal Asing
571	Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
572	Pasar Uang dan Modal
573	Saham

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

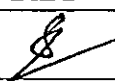




<b>580</b>	<b>PERBANKAN MONETER</b>
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Bank Kaltim
584.2	BKK, BPR BKK, Bank Pasar
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/ Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran meliputi check, girowesel, transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	<b>AGRARIA</b>
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Objek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
592.2	Ganti Rugi

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.31	Penetapan Imbangan Gadai Tanah
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform( YDL)
593	Pengurusan Hak - Hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu :Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus.
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan



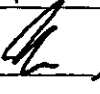
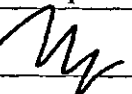
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
593.32	<i>Warga Negara Indonesia</i>
593.312	<i>Warga Negara Asing</i>
593.32	<i>Badan Hukum</i>
593.321	<i>Badan Hukum Indonesia</i>
593.322	<i>Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing</i>
593.33	<i>Tanah Gedung-Gedung Negeri</i>
593.4	<i>Guna Usaha</i>
593.41	<i>Perkebunan Besar</i>
593.42	<i>Perkebunan Rakyat</i>
593.43	<i>Peternakan</i>
593.44	<i>Perikanan</i>
593.45	<i>Kehutanan</i>
593.5	<i>Hak Guna Bangunan</i>
593.51	<i>Perorangan</i>
593.52	<i>Badan Hukum</i>
593.53	<i>P3MB ( Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda )</i>
593.54	<i>Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5 / 56</i>
593.55	<i>Pemulihan Hak ( Pen Pres 4 / 1960 )</i>
593.6	<i>Hak Pengelolaan</i>
593.61	<i>PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate</i>
593.62	<i>Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan</i>
593.7	<i>Sengketa Tanah</i>
593.71	<i>Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)</i>
593.8	<i>Pencabutan dan Pembebasan Tanah</i>
593.81	<i>Pencabutan Hak</i>
593.82	<i>Pembebasan Tanah</i>
593.83	<i>Ganti Rugi Tanah</i>
594	<i>Pendaftaran Tanah</i>
594.1	<i>Pengukuran/ Pemetaan</i>
594.11	<i>Fotogrametri</i>
594.12	<i>Terristris</i>

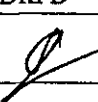
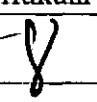

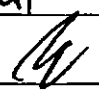
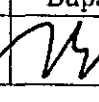
Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				





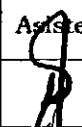


<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuatan Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
600	<b>PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN</b>
601	
602	
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu
604.2	Aspal
604.3	Besi dan Logam Lainnya
604.31	Besi Beton
604.32	Besi Profil (Konstruksi)
604.33	Paku
604.34	Alumunium Profil
604.4	Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet Kayu)
604.5	Semen
604.6	Kayu
604.7	Bahan Penutup Atap
604.8	Alat Alat Penggantung dan Pengunci
604.9	Bahan Bahan Bangunan Lainnya
605	<b>I n s t a l a n s i</b>
605.1	Instalansi Bangunan
605.2	Instansi Listrik
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
605.3	Instalansi Air / Sanitasi
605.4	Instalansi Pengatur Udara

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				



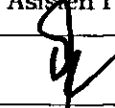

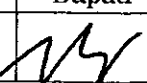
605.5	<i>Instalansi Akustik</i>
605.6	<i>Instalansi Cahaya / Penerangan</i>
606	<i>Konstruksi Pencegahan</i>
606.1	<i>Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran</i>
606.2	<i>Terhadap Gempa</i>
606.3	<i>Terhadap Angin / Udara / Panas</i>
606.4	<i>Terhadap Kegaduhan</i>
606.5	<i>Terhadap Gas / Explosive</i>
606.6	<i>Terhadap Serangga</i>
606.7	<i>Terhadap Radiasi Atom</i>
<b>610</b>	<b>PENGAIRAN</b>
611	<i>Irigasi</i>
611.1	<i>Bangunan Waduk</i>
611.11	<i>Bendungan</i>
611.12	<i>Tanggul</i>
611.13	<i>Pelimpahan banjir</i>
611.14	<i>Menara pengambilan</i>
611.15	<i>Pembangunan dermaga</i>
611.2	<i>Bangunan pengambilan</i>
611.21	<i>Bendungan</i>
611.22	<i>Bendungan dengan pintu bilas</i>
611.23	<i>Bendungan dengan pompa</i>
611.24	<i>Pengambilan bebas</i>
611.25	<i>Pengambilan bebas dengan pompa</i>
611.26	<i>Sumur dengan pompa</i>
611.27	<i>Kantung lumpur</i>
611.28	<i>Sif ekstrektor</i>
611.29	<i>Escopechenel</i>
611.3	<i>Bangunan pembawa</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
611.31	<i>Saluran</i>
611.311	<i>Saluran Induk</i>
611.312	<i>Saluran sekunder</i>
611.313	<i>Suplesi</i>
611.314	<i>Tersier</i>
611.315	<i>Saluran kwarter</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

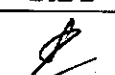



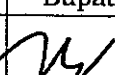
611.316	<i>Saluranpasangan</i>
611.317	<i>Salurantertutup/terowongan</i>
611.32	<i>Bangunan</i>
611.321	<i>Bangunanbagi</i>
611.322	<i>Bangunan dan sadap</i>
611.323	<i>Bangunansadap</i>
611.324	<i>Bangunan check</i>
611.325	<i>Bangunanterjun</i>
611.33	<i>BaxTersier</i>
611.34	<i>Got miring</i>
611.35	<i>Talang</i>
611.36	<i>Syphon</i>
611.37	<i>Gorong-gorong</i>
611.38	<i>Pelimpahan samping</i>
611.4	<i>Bangunan Pembuangan</i>
611.41	<i>Saluran</i>
611.411	<i>Saluran Pembuangan induk</i>
611.412	<i>Saluran Pembuangan sekunder</i>
611.413	<i>Saluran Pembuangan tersier</i>
611.42	<i>Bangunan</i>
611.421	<i>Bangunan out let</i>
611.422	<i>Bangunanterjun</i>
611.423	<i>Bangunan penahan banjir</i>
611.43	<i>Gorong-gorong pembuangan</i>
611.44	<i>Talang pembuang</i>
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
611.45	<i>Syphon pembuangan</i>
611.5	<i>Bangunan lainnya</i>
611.51	<i>Jalan</i>
611.511	<i>Jalan Inspeksi</i>
611.512	<i>Jalan Logistik</i>
611.52	<i>Jembatan</i>
611.521	<i>Jembatan Inspeksi</i>
611.522	<i>Jembatan Hewan</i>
611.53	<i>Tangga Cuci</i>
611.54	<i>Kubangan Kerbau</i>

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

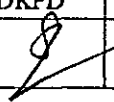
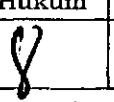
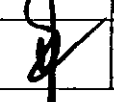
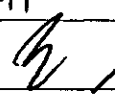
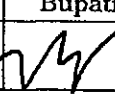
611.55	Waduk Lapangan
611.56	Bangunan Perunjang
611.57	Jaringan Telepon
611.58	Stasiun Argo
611.59	Bangunan TPI dan Pasar Ikan
612	Polder
612.1	Tanggul Keliling
612.11	Tanggul
612.12	Bangunan Penutup Sungai
612.13	Jembatan
612.2	Bangunan Pembawa
612.21	Saluran
612.211	Saluran Muka
612.212	Saluran Pembawa Induk
612.213	Saluran Pembawa Sekunder
612.214	Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
612.22	Bangunan Bagi
612.221	Gorong-Gorong
612.222	Syphon
612.3	Bangunan Pembuangan
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
612.31	Stasiun Pompa Pembuangan
612.32	Saluran
612.321	Saluran Pembawa Induk
612.322	Saluran Pembawa Sekunder
612.33	Pintu Air Pembuangan
612.34	Gorong-gorong Pembuangan
612.35	Syphon Pembuangan
612.4	Bangunan Lainnya
612.41	Bangunan
612.411	Bangunan Pengukur Air
612.412	Bangunan Pengukur Curah Hujan
612.413	Bangunan Gudang Stasiun Pompa
612.414	Bangunan Listrik Stasiun Pompa
612.42	Rumah Petugas Eksploitasi
613	Pasang Surut

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				




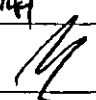

613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	BangunanPembuangan
613.21	SaluranPembawaInduk
613.22	SaluranPembawaSekunder
613.23	SaluranPembawaTersier
613.24	SaluranPenyimpanan Air
613.25	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	BangunanLainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	BangunanPengukur Muka Air
613.333	BangunanPengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	BangunanPengaman
614.11	TanggulBanjir
614.12	Pintu PengaturBanjir
614.13	KlepPengaturBanjir
614.14	TembokPengamanTalut
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	SaluranPengaman
614.21	SaluranBanjir

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

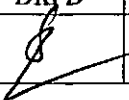


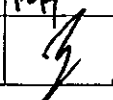
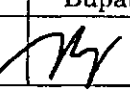
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	BangunanLainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.32	Stasiun
614.321	StasiunPengukur Curah Hujan
614.322	StasiunPengukur Air
614.323	StasiunPengukurCuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	BangunanPembawa
616.3	BangunanPembuangan
616.4	Bangunan Lainnya
<b>620</b>	<b>JALAN</b>
621	Jalan Kota / Kabupaten
621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	BangunanSementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	LaboratoriumLapangan
621.26	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
621.32	Stabilisasi

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong -Gorong (Culvert)
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Sampingan
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
621.91	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara






Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

622.15	Jembatan Sementara
622.16	Kantor/ Gedung Proyek
622.17	Barak Kerja
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
622.18	Laboratorium Lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (Pavement)
622.31	Lapis Pondasi Bawah
622.32	Lapis Pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong( culvert)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu penerbangan
622.83	Lampu Pengatur lalulintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R, O, W (Sempadan)

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				



<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
622.86	Rel pengamananan
622.87	Pagar
622.88	Turappenahan
622.89	Bronjong
633	Jalan Nasional
633.1	Daerah penguasaan
633.2	Badan jalan
633.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
633.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
633.5	Median
633.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengamananan (rambu-rambu)
<b>630</b>	<b>JEMBATAN</b>
631	Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunansementara
631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatansementara
631.23	Kantor proyek
631.24	Gedung proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratoriumlapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian tanah
631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
631.41	Pondasi kepala jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi angker

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

631.5	Bangunan bawah
631.51	Kepalajembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar

Kepala DKPD	Kabag. Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
